

BAB III

KONFLIK DI SURAKARTA PASCA PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA (DIS)

Pada masa revolusi terjadi ketegangan-ketegangan sosial dan konflik politik di Surakarta. Surakarta menjadi arena pergolakan sosial yang kemudian menjalar kepada pertikaian politik. Pergolakan sosial itu memuncak saat pemberlakuan Daerah Istimewa Surakarta. Pertentangan-pertentangan di dalam pemberlakuan Swapraja Surakarta itu pada akhirnya berujung dengan terjadinya konflik yang didasari penolakan atas bentuk-bentuk feodalisme. Konflik yang terjadi di Surakarta merupakan sebuah konflik vertikal, yakni konflik yang muncul akibat dari pertentangan dua kelompok masyarakat. Selain itu, masyarakat yang terlibat konflik vertikal juga ditunjang oleh perbedaan akan status dan kedudukannya.⁹⁸ Secara sederhana, konflik vertikal di Surakarta terjadi antara masyarakat biasa melawan bentuk-bentuk feodalisme yang menguntungkan kaum Bangsawan atau Priyayi.

3.1 Gerakan Anti Swapraja

Anti Swapraja merupakan sebutan untuk gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di Surakarta masa revolusi. Gerakan ini dengan tujuan untuk menolak diberlakukannya Daerah Istimewa Surakarta karena dianggap bagian dari feodalisme, sebuah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar terhadap kaum Bangsawan. Beberapa kelompok Gerakan Anti Swapraja pasca pembentukan Daerah Istimewa Surakarta diantaranya, sebagai berikut.

⁹⁸ Thomas Santoso, *Konflik dan Perdamaian*. (Surabaya: Saga Jawadwipa, 2019), hlm. 7.

3.1.1 Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan

Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta menjadikan alasan bagi kelompok oposisi turut memindahkan basisnya, salah satu kelompok oposan yang memindahkan kekuatannya ke Surakarta adalah Persatuan Perjuangan. Sultan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka alias Tan Malaka, lahir di Suliki Sumatera Barat pada 2 Juni 1987 merupakan tokoh organisasi Persatuan Perjuangan. Tan Malaka merupakan tokoh yang memiliki watak radikal sekaligus mempunyai basis akar rumput pemuda-pemuda revolusioner.⁹⁹

Awal pembentukan Persatuan Perjuangan didasarkan atas keinginan membuat wadah perkumpulan guna meneruskan cita-cita revolusi Indonesia. Lahirnya Persatuan Perjuangan didorong atas lima pertimbangan, yakni:

1. Guna mengingat pertentangan antara kemauan serta tindakan yang diambil Kepala Negara dengan kehendak rakyat dimana-mana.
2. Mengingat perselisihan dan permusuhan antar partai-partai.
3. Guna mengingat permusuhan antar pasukan.
4. Guna mengingat sikap dan tindakan Inggris yang mengakui kedaulatan Belanda atas Bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya.
5. Serta sebagai pengingat kedatangan Van Mook yang didasarkan usulan *Gemeenebest* dan *Rijkverbondnya*.¹⁰⁰

Melalui lima pertimbangan di atas, Persatuan Perjuangan resmi dibentuk pada 3 Januari 1946. Pada awal pendiriannya, keanggotaan

⁹⁹ Beberapa pengikut Tan Malaka merupakan pemuda-pemuda mantan pasukan PETA, Romusha dan perkumpulan pemuda-pemuda radikal lainnya. Roeslan Abdulgani. dkk., *Soedirman Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan*. (Jakarta: Restu Agung, 2004), hlm. 89.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

Persatuan Perjuangan terdiri atas 141 organisasi politik dan kelaskaran. Dalam visinya, Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka disamping mengisyaratkan perjuangan terhadap bentuk-bentuk penjajahan juga membuka peluang untuk menggaungkan revolusi-revolusi sosial kedaerahan.¹⁰¹ Revolusi sosial dianggap perlu dilakukan untuk menghilangkan bentuk-bentuk feodalisme yang tak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

Revolusi kedaerahan yang digaungkan Tan Malaka turut direalisasikan Persatuan Perjuangan di Surakarta. Surakarta dipilih kelompok oposisi untuk menjadi tandingan Pemerintah Indonesia di Yogyakarta.¹⁰² Tujuan Tan Malaka beserta Persatuan Perjuangan membangun kekuatan dan melancarkan aksi-aksinya di Surakarta, yakni meruntuhkan kekuatan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Disamping hal itu, Persatuan Perjuangan juga turut disiapkan untuk menggoyahkan Kabinet Syahrir. Praktik-praktik dari realisasi visi Persatuan Perjuangan dilakukan *underbow* organisasi, yakni Barisan Banteng. Barisan Banteng inilah yang kemudian merealisasikan visi revolusioner Tan Malaka.

Pada hakikatnya, ketegangan-ketegangan politik pada awal kemerdekaan Indonesia turut mempengaruhi pula perkembangan politik di daerah. Kelompok Persatuan Perjuangan di Surakarta nekat melakukan kup

¹⁰¹ Secara tak langsung, Tan Malaka sebagai pemimpin Persatuan Perjuangan merestui aksi-aksi untuk menentang bentuk feodalisme.

¹⁰² Julianto Ibrahim, *loc. cit.*

dan melancarkan tindakan penculikan atas Perdana Menteri Syahrir beserta rombongannya.¹⁰³ Aksi penculikan terhadap pembesar Republik Indonesia ini dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah karena dipandang terlalu lunak terhadap Belanda. Pasca peristiwa penculikan, Presiden Soekarno yang mengetahui aksi kriminal tersebut langsung mengeluarkan ultimatum lewat siaran radio, yang penggalan maklumatnya berbunyi:

Saya tidak ingin menjadi diktator! Saya ingin adanya satu pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Saya oleh karena itu hanya sementara waktu saja mengambil segala kekuasaan negara di tangan saya sendiri. Kepada segenap rakyat berpikiran sehat, saya minta ikut berusaha untuk mengembalikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Kemakmuran Ir Darmawan Mangunkusumo, Mayor Jenderal Sudibjo dan lain-lain yang turut kena culik dengan selamat kepada kami.¹⁰⁴

Pasca mendengar ultimatum Presiden Soekarno, Persatuan Perjuangan sebagai pihak yang menculik langsung bertekad membebaskan Perdana Menteri Syahrir. Syahrir ditawan di desa terpencil yakni Desa Paras. AK Yusuf selaku pimpinan aksi setelah berkompromi dengan anggota Persatuan Perjuangan yang lain, akhirnya memutuskan Perdana Menteri Syahrir beserta rombongannya dibebaskan. Perdana Menteri Syahrir tiba di Yogyakarta untuk menghadap Presiden Soekarno pada 30 Juni 1946.

¹⁰³ Syahrir yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri diculik Persatuan Perjuangan di *Javasche Bank* Surakarta sekitar pukul 23.00 WIB. Penculikan yang dilakukan Persatuan Perjuangan itu dipimpin Mayor AK Yusuf bersama empat orang pasukan dan dilengkapi senjata api. Lihat dalam <https://historia.id/politik/articles/kisah-penculikan-sjahrir-vx2Qx/page/2>. Diakses pada 21 April 2024 pukul 13.35 WIB

¹⁰⁴ Ultimatum Presiden Soekarno tersebut disiarkan pada tanggal 29 Juni 1946. *Ibid.*,

3.1.2 Barisan Banteng

Surakarta merupakan daerah dengan kehidupan sosial yang kompleks. Kompleksitas kondisi sosial dapat dilihat melalui stratifikasi sosial yang berlaku. Masyarakat Surakarta hidup dalam tatanan feodalisme, suatu sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan Bangsawan atau Priyayi. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran merupakan dua institusi tradisional yang mengedepankan feodalisme. Keadaan sosial tersebut berlangsung lama, setidaknya sampai masa revolusi.

Pada masa revolusi keadaan Surakarta menjadi daerah bergejolak yang disebabkan oleh berbagai faktor. Iklim politik pasca kemerdekaan, membawa nafas pembaruan penghilangan bentuk-bentuk feodalisme yang hanya dinikmati oleh para bangsawan. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan anti swapraja di Surakarta. Salah satunya yakni Gerakan Barisan Banteng.

Barisan Banteng merupakan nama baru dari sebuah organisasi perjuangan bentukan Jepang, yakni Barisan Pelopor.¹⁰⁵ Pada pertengahan Desember 1945 terjadi perundingan yang dilangsungkan di Surakarta, menghasilkan satu putusan mengganti penamaan Barisan Pelopor menjadi Barisan Banteng. Adanya pemberlakuan Daerah Istimewa Surakarta atau swapraja Surakarta yang diawali Surat Keputusan Presiden Soekarno

¹⁰⁵ Barisan Pelopor didirikan pada 1 November 1944 oleh Jepang yang bertujuan untuk merekrut pemuda guna membela Jepang dalam menghadapi serangan sekutu. Selengkapnya dalam <https://tirto.id/sejarah-organisasi-semi-militer-masa-pendudukan-jepang-gbVy>. Diakses pada 27 Februari 2024 pukul 12.45 WIB

tanggal 19 Agustus 1945. Surat keputusan Presiden tersebut mengakibatkan kelompok oposisi bereaksi. Terlebih lagi, perpindahan ibu kota ke Yogyakarta juga turut memboyong kelompok oposisi pindah ke Surakarta.¹⁰⁶ Kekuatan Barisan Banteng pada tahap awal terdiri dari 10.000 personil dan merupakan para pengikut setia dr. Moewardi dan Soediro, seorang dokter progresif yang puritan.¹⁰⁷ Misi utama Barisan Banteng yakni menolak pemberlakuan swapraja dan feodalisme, karena dianggap tak sesuai dengan nafas semangat kemerdekaan.

Aksi pertama Barisan Banteng adalah melakukan penculikan terhadap Patih Kasunanan Surakarta, yakni KRMH Sosrodiningrat IV pada 17 Oktober 1945. Paku Buwono XII merespon kekosongan jabatan Patih dengan mengangkat KRMT Joedonagoro. Joedonagoro dianggap sosok berpengalaman dan loyal terhadap Kasunanan Surakarta. Jabatan Patih yang dipegang Joedonagoro hanya bertahan selama 5 bulan. KRMT Joedonagoro diculik oleh pelaku yang sama tanggal 15 Maret 1946.¹⁰⁸

Aksi-aksi penculikan yang dilakukan Barisan Banteng terus berlangsung. Para *Pengageng* Kasunanan Surakarta menjadi sasaran selanjutnya. Barisan Banteng menculik Paku Buwono XII, Gusti Kanjeng

¹⁰⁶ Pindahannya Ibu Kota ke Yogyakarta disebabkan kondisi Jakarta yang tak kondusif. Kelompok-kelompok oposisi yang ikut pindah memilih Surakarta sebagai basis tandingan Pemerintah Indonesia di Yogyakarta. Surakarta dipandang sebagai daerah dengan karakteristik paling mirip dengan kelompok oposisi yang menggaungkan komunisme. Julianto Ibrahim, *Bandit dan Pejuang di Simping Bengawan*. (Surakarta: Bina Citra Pustaka, 2004), hlm. 101.

¹⁰⁷ Soediro lebih dikenal dengan julukan Mbah.

¹⁰⁸ Aksi penculikan Patih Sosrodiningrat IV dan Patih Joedonegoro dilakukan Barisan Banteng guna menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat, aksi ini berujung pada tindakan pembunuhan. Wawancara Bambang Sugiarto, tanggal 27 Desember 2023 di Kompleks Baluwarti Keraton Kasunanan Surakarta.

Ratu (Ibu Paku Buwono XII) dan Soerjohamidjojo pada Januari 1946.¹⁰⁹

Para *Pengangeng* itu diasingkan beberapa hari dan dipaksa untuk menyetujui beberapa tuntutan, yang isinya:

1. Minta dihapuskannya Daerah Istimewa Surakarta atau Swapraja Surakarta.
2. Memaksa Sinuhun Paku Buwono XII meletakkan tahta guna digantikan pejabat lain.
3. Menuntut perubahan-perubahan dalam peraturan Daerah Istimewa atau Swapraja yang tidak sesuai lagi dengan zamannya.¹¹⁰

Selain ketiga tuntutan diatas, Barisan Banteng menyodorkan kesepakatan khusus untuk Paku Buwono XII. Kesepakatan yang harus disetujui itu yakni bersedia dipanggil “Bung” daripada julukan “Sinuhun”. Panggilan “Bung” dianggap lebih revolusioner dan tak kolot.¹¹¹ Panggilan “Bung” pada saat itu banyak digunakan untuk membakar semangat para pejuang republik.

Pasca penculikan Patih Joedonagoro tanggal 15 Maret 1946, kurang dari sebulan kemudian Barisan Banteng kembali menyasar institusi Kepatihan. Pegawai Kepatihan menjadi sasaran penculikan dan mengalami nasib serupa. Para pegawai Kepatihan yang menjadi korban yakni: KRMTH Poerwodiningrat, Mr. Drs. Notonagoro, RNg Prodjowiredjo, RMT

¹⁰⁹ Para *Pengangeng* disekap di Kandang Menjangan Kartasura. Karkono Kamajaya Partokusumo, *Revolusi di Surakarta*. (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 12.

¹¹⁰ Bram Setiadi, dkk., *Raja di Alam Republik Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2001), hlm. 89.

¹¹¹ Barisan Banteng menerobos Keraton Kasunanan Surakarta dan menculik para *Pengangeng* mengenakan pakaian serba merah. Pasca peristiwa penculikan, Paku Buwono XII melarang pengenaaan pakaian dan atribut berwarna merah masuk ke Keraton Kasunanan Surakarta. Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

Koedonowarso, RMT Djogonagoro, RMNg Prodjowiredjo, KRT Soeronagoro, KRT Mr. Djaksonagoro dan RMNg Prodjowahjono.

Suasana Kepatihan yang masih bergejolak dan kekosongan jabatan Patih memaksa Paku Buwono XII mengangkat KRMH Woerjaningrat pada 15 April 1946. Woerjaningrat dipilih karena dianggap loyalis dan bisa mengatasi pergolakan di Kepatihan.¹¹² Tiga hari pasca pengangkatan jabatan Patih, Barisan Banteng kembali menerobos Keraton Kasunanan Surakarta memaksa Paku Buwono XII untuk menyerahkan kekuasaannya. Sebuah aksi yang sama-sama dialami Kadipaten Mangkunegaran.

Kadipaten Mangkunegaran mendapatkan ancaman yang sama, yakni penculikan. Barisan Banteng dibawah komando dr. Moewardi melancarkan aksinya pada 18 April 1946, aksi yang sama-sama dialami Kasunanan Surakarta. Adipati Mangkunegara VIII selaku pemimpin Kadipaten Mangkunegaran yang menjadi target operasi penculikan, merespon dengan melakukan operasi pertahanan tandingan. Adipati Mangkunegara VIII mengerahkan prajuritnya mengepung Pura Mangkunegaran untuk menghalau Barisan Banteng.¹¹³ Operasi pertahanan tandingan semacam ini tidak dilakukan Kasunanan Surakarta.

¹¹² Patih Woerjaningrat melakukan berbagai pendekatan-pendekatan dengan kelompok Anti Swapraja terutama Barisan Banteng dengan mengadakan perundingan. Wawancara Bambang Sugiarto dan Bram Setiadi, *op.cit.*, hlm. 90.

¹¹³ Prajurit yang dikerahkan Adipati Mangkunegara VIII bernama Pasukan Rumeksopuro. Pasca pembubaran Legiun Mangkunegaran, tugas pertahanan dan keamanan Kadipaten Mangkunegaran menjadi tanggung jawab Pasukan Rumeksopuro. Lamia Rozziana Putri, Mangkunegara VIII: Sikap Dalam Revolusi Sosial Tahun 1945-1946. (*Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*: Vol 3, No 2, 2018), hlm. 53.

Selepas melancarkan aksi pada 18 April 1946, untuk kesekian kalinya Barisan Banteng kembali melakukan gerakannya. Aksi penahanan dilakukan oleh Barisan Banteng diwakili Hadisunarto, Sastronegoro, Mulyadi Joyomartono, dr. Moewardi, Mangkusudiyono dan Hadisunarto. Target operasi menysar pada Patih Kadipaten Mangkunegaran, yakni Partono Handoyonoto.¹¹⁴

Gejolak sosial yang disebabkan Barisan Banteng di Surakarta menjalar keseluruh daerah dibawah naungan Kasunanan Surakarta. Barisan Banteng mencopot secara paksa posisi Bupati di daerah-daerah.¹¹⁵ Pencopotan Bupati oleh Barisan Banteng pertama kali menysar Bupati Boyolali, yakni KRT Reksonagoro bersama wakilnya Raden Tumenggung Tondonagoro. Aksi tersebut membuat keadaan di daerah-daerah semakin kacau.

Kabupaten Klaten merupakan daerah bawahan Kasunanan Surakarta yang memutus hubungan pertama kali dengan Paku Buwono XII. Kabupaten Klaten melalui Pegawai Pamong Pradja menyatakan sikap memisahkan diri dengan berbagai alasan. Para Pegawai Pamong Pradja tak mau jika keadaan Klaten semakin kacau, mengingat Barisan Banteng juga seringkali membuat kerusuhan yang menysar masyarakat. Aksi *penggedoran* dan pencurian menjadi motif kriminalitas yang meresahkan.

¹¹⁴ Julianto Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 157.

¹¹⁵ Posisi Bupati di Kasunanan Surakarta diisi orang-orang kepercayaan Paku Buwono yang sedang memerintah. Dapat dikatakan, orang-orang yang mendapat posisi Bupati merupakan orang yang loyal kepada Kasunanan Surakarta.

Untuk menyikapi hal itu, Pegawai Pamong Pradja Klaten mengeluarkan maklumat yang berbunyi:

Dengan perantaraan ini:

Kami: Pegawai Pamong Pradja Daerah Kaboepaten Klaten.

Menjatakan:

Bahwa moelai tanggal 26-4-1946 dijam 12 siang, mendjadi Pegawai Pemerintah Republik Indonesia, dan memoetoeskan segala perhoeboengan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Kasoenanan Soerakarta.¹¹⁶

Pernyataan memisahkan diri itu dilakukan pada 26 April 1946 yang pada akhirnya diikuti oleh daerah-daerah lainnya secara berturut-turut. Kabupaten Sragen lewat Dewan Pekerdja K. N. I Sragen memutus hubungan dengan Kasunanan Surakarta yang ditandai dengan maklumat, yakni:

Kami atas nama Rakjat seloeroeh Sragen, memproklamirkan bahwa moelai hari ini, tanggal 27 April 1946, djam 12 siang, daerah Sragen memoetoeskan perhoeboengannja dengan Pemerintah Negeri Soerakarta, dan berhoeboengan langsoeng dengan Pemerintah Poesat Repoeblik Indonesia.¹¹⁷

Keadaan yang semakin pelik oleh berbagai aksi penculikan dan pembunuhan, menjadikan posisi Kasunanan Surakarta menjadi lemah dimata rakyat. Terlebih lagi peristiwa pemisahan diri daerah-daerah mendapat respon postif masyarakat. Laskar-laskar masyarakat di daerah yang semula loyal kepada Kasunanan Surakarta, berbalik mendukung pembubaran swapraja.¹¹⁸ Mengingat keadaan yang sedemikian pelik, Paku

¹¹⁶ Keputusan Pegawai Pamong Pradja tersebut ditegaskan kembali melalui maklumat Dewan Pekerdja K. N. I Klaten tanggal 1 Mei 1946. Surat kabar *Kedaulatan Rakjat* edisi 4 Mei 1946.

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ Wawancara dengan Bambang Sugiarto, tanggal 27 Desember 2023 di Kompleks Baluwarti Keraton Kasunanan Surakarta.

Buwono XII mengeluarkan keputusan pembubaran swapraja dan menyerahkan semua urusan kepada Pemerintah Indonesia. Keputusan penyerahan dilakukan setelah menimbang berbagai aksi-aksi kekerasan dan lahirnya mosi dari beberapa pihak pada tanggal 29 April 1946.¹¹⁹ Kerelaan hati Paku Buwono XII itu diwujudkan dengan kesediaan mengeluarkan maklumat yang isinya:

Mengingat apa jang terseboet dalam pasal 18 Anggaran Dasar kita dan Piagam dari P. J. M Presiden tertanggal 19-8-'45 dan mengetahoei gerak-gerik didalam kalangan rakjat didaerah kami hal lenjap atau tidaknja daerah istimewa Soerakarta Hadiningrat. Kami mempermakloemkan kepada rakjat kami, bahwa djikalau memang terang mendjadi kehendak rakjat sebenar-benarnja akan lenjapnja daerah Istimewa Soerakarta Hadiningrat telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Repoeblik Indonesia, kami tidak berkeberatan akan menjerahkan pemerintahan kami kepada Pemerintahan Agoeng tadi.¹²⁰

Keluarnya maklumat diatas ternyata mendapatkan respon khusus kelompok oposan. Pihak dr. Moewardi dan pengikutnya yang tergabung dalam Barisan Banteng menyambut gegap gempita maklumat itu. Maklumat Paku Buwono XII itu bahkan dibalas Barisan Banteng dengan menyebarkan pengumuman di tanggal 1 Mei 1946, berbunyi:

Markas Besar Barisan Banteng Repoeblik Indonesia serta Markas Barisan Banteng Soerakarta memberikan tahoe sangat girangnja membatja Makloemat No. II dari Seri Padoeka Pakoeboewono XII. Karena dasar dari perdjoangan Barisan Banteng ialah oentoeik memegang tegoeih asas2 dan dasar bentoek Negara Indonesia sebagai Repoeblik Kesatoean, maka perobahan daerah2 jang sekarang masih Istimewa mendjadi daerah jang mendjoendjoeng tinggi poela sifat Repoeblik mengenangkan hati kami.

¹¹⁹ Mosi pembubaran Swapraja Surakarta diikuti oleh Kepolisian, Pamong Praja, Angkatan Muda, Barisan Banteng, Gerakan Rakyat Indonesia dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Semua kelompok tersebut merupakan pihak berpengaruh di Surakarta. Julianto Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 158.

¹²⁰ Maklumat ini dikeluarkan oleh Paku Buwono XII dan diumumkan oleh Patih Woerjaningrat.

Lebih2 djikalau kehendak demikian itoe keloear dari Kepala Daerah Istimewa Soerakarta Hadiningrat benar2 mengetahoei kehendak djaman, sehingga redla hati berkorban menoe djoe ke kesempoernaan Negara Republik Indonesia.

Kami dari Barisan Banteng tahoe, bahwa makloemat tsb. sesoenggoehnja telah akan dikeloearkan pada beberapa hari lebih doeloe, akan tetapi oleh karena ada rintangan dari loear pengaroehnja Seri Padoeka Pakoeboewana XII tertoeenda sampai tgl. 30-4-1946.

Kami sebagai Rakjat Negara Repoeblik Indonesia, sekarang menoe djoe kepoetoesan P. J. M. Presiden jang semoeanja akan mengesjahkan penjerahan Daerah Istimewa itoe kepada Pemerintah Poesat dengan tjara jang sesoeai dengan principe Repoeblik dan dengan menghargai sikap dari Seri Padoeka Pakoeboewono.¹²¹

Keputusan Paku Buwono XII yang rela menyerahkan kedaulatannya, tak sebanding dengan sikap Adipati Mangkunegara VIII. Adipati Mangkunegara VIII tetap bersikeras mempertahankan berlakunya swapraja. Bahkan Adipati Mangkunegara VIII malah mengeluarkan maklumat yang berisikan:

Menghargai keinginan rakjat oentoek demokrasi dan keadilan sosial, maka Pemerintahan Mangkoenegara VIII menjatakan bahwa selama beberapa boelan, soeatoe oendang-oendang baroe oentoek wilajah Mangkoenegaran telah direntjanakan, hal itoe akan menetapkan Mangkoenegaran sebagai kepala soeatoe Daerah Istimewa Mangkoenegaran langsoeng dibawah Presiden dan menerima sesoeai dengan ketentoean-ketentoean Oendang-Oendang Repoeblik Indonesia.¹²²

Sikap keras kepala Adipati Mangkunegara VIII membuat Barisan Banteng dan KNID kabupaten-kabupaten dibawahnya mengajukan desakan

¹²¹ Maklumat ini dikeluarkan Markas Barisan Banteng disahkan oleh dr. Moewardi dan Hadisunarto selaku pemimpin Barisan Banteng Soerakarta.

¹²² Surat kabar *Kedaulatan Rakjat* edisi 4 Mei 1946.

agar Kadipaten Mangkuneagaran mengikuti langkah Paku Buwono XII.¹²³ Ditengah panasnya suhu revolusi, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri yakni Dr. Soedarsono berusaha mendinginkan situasi. Upaya Dr. Soedarsono tersebut berlanjut dengan mengirimkan delegasi Soerjo sebagai perwakilan pemerintah di Surakarta.¹²⁴

Penempatan Soerjo di Surakarta ditandai dengan adanya maklumat Menteri Dalam Negeri pada 23 Mei 1946, yang berbunyi:

1. Menempatkan di Soerakarta oentoeik sementara waktoe seorang wakil pemerintah poesat jang mendjalankan pemerintahan di seloeroeh daerah Soerakarta. Wakil pemerintah ini diberi kekoeasaan oentoeik mengambil tindakan-tindakan jang perloe goena mengembalikan soeasana tenteram di daerah Soerakarta. Kewadjiban ini diserahkan kepada Soerjo, Goebernoer Djawa Timoer.
2. Sedjalan dengan maksoed terseboet di atas, akan diambil tindakan-tindakan jang layak terhadap orang-orang jang telah melanggar atoeran-atoeran pemerintah.¹²⁵

Pasca pengangkatan Soerjo di tanggal 23 Mei 1946, sehari kemudian terjadi operasi terhadap orang-orang yang tergabung dengan Barisan Banteng. Kelompok oposan yang ditangkap kemudian ditahan sementara waktu, khusus dr. Moewardi dipisahkan untuk ditahan di Yogyakarta dan disisi lain penangkapan tersebut memicu protes besar-besaran.

Barisan Banteng yang diambil alih Soediro atau Mbah memaksa Menteri Dalam Negeri untuk segera membebaskan anggota-anggotanya, termasuk dr. Moewardi. Pemaksaan untuk membebaskan para anggota

¹²³ Kabupaten bawahan Kadipaten Mangkunegaran tersebut meliputi Kota Mangkunegaran, Karanganyar, Wonogiri dan Baturetno.

¹²⁴ Soerjo diangkat Menteri Dalam Negeri untuk bertugas sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di Surakarta. Julianto Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 161.

¹²⁵ Surat kabar *Banteng* edisi 26 Mei 1946 diperoleh dari Julianto Ibrahim, *Ibid.*,

Barisan Banteng mendapat persetujuan pemerintah. Atas pembebasan itu, Barisan Banteng justru merayakannya dengan menggelar pawai besar-besaran.¹²⁶ Perbedaan keadaan antara Yogyakarta sebagai basis Pemerintah Indonesia dengan Surakarta yang dikuasai kelompok oposisi, membuat Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16/SD/1946 tertanggal 15 Juli 1946 sebagai payung hukum pembekuan Daerah Istimewa Surakarta atau Swapraja Surakarta.

Menimbang: bahwa di seluruh Indonesia telah terjadi serangan dan bahaya serangan seperti termaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya;

Meningat: Akan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X; Mengingat pula: pasal 2 ayat 1 Undang-undang Keadaan Bahaya tanggal 6-6-1946;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat:

Memutuskan:

Menetapkan Undang-Undang sebagai berikut:

satu-satunya pasal Bahwasanya pernyataan keadaan bahaya buat :

Daerah Istimewa Surakarta tanggal 6 Juni 1946;

Jawa dan Madura tanggal 7 Juni 1946 dan

Seluruh Indonesia tanggal 28 Juni 1946 adalah syah.¹²⁷

Pasca pembekuan status Daerah Istimewa Surakarta oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana peraturan di atas, instansi Kepatihan sebagai tempat tinggal sekaligus bekerja Patih pada kenyataannya justru memasuki puncak

¹²⁶ Pawai merayakan pembebasan Barisan Banteng diadakan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi sekarang. wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

¹²⁷ Melalui Peraturan Presiden tersebut telah menandai pembekuan DIS, baik secara *de jure* ataupun *de facto*. Wawancara dengan Koes Murtiyah dan Julianto Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 166..

keruntuhan.¹²⁸ Pada mulanya, tupoksi Kepatihan di Kasunanan Surakarta dilegitimasi untuk mengambil alih urusan pemerintahan. Kondisi yang demikian itu mengakibatkan Patih mampu menjalin hubungan dengan pihak luar seperti Pemerintah Kolonial bahkan *kawula alit* secara langsung. Mengingat pengaruh Patih yang tinggi itu, tak jarang jika pengaruh dan ambisi patih yang memerintah kerap terlibat konflik dan kontroversi. Atas dasar itulah kemudian Barisan Banteng sebagai kelompok oposisi menganggap Kepatihan sebagai sebuah peninggalan kolonial yang memupuk feodalisme dan harus dihilangkan. Penghilangan ini masuk dalam visi kelompok oposisi yang tumbuh di Surakarta.

Adanya sistem Kepatihan telah menciptakan jarak antara Kasunanan Surakarta dengan *kawula alit*. Kondisi yang demikian itu dianggap menjadi faktor kurang efektifnya kepemimpinan Paku Buwono XII. Barisan Banteng sebagai kelompok Gerakan Anti Swapraja melancarkan berbagai aksinya. Pasca aksi penculikan Patih Sosrodiningrat IV, Patih Joedonegoro dan beberapa pegawai Kepatihan, kelompok oposisi ini juga turut membakar kompleks *Dalem Kepatihan*.¹²⁹ Pembakaran Kepatihan memiliki dua motif paling mendasar. Pertama pembakaran bertujuan untuk menghilangkan sistem Kepatihan yang tak sesuai dengan nilai revolusi.

¹²⁸ Keberadaan Kepatihan sering berpindah-pindah. Pada awalnya kompleks Kepatihan menempati area *Dalem Sindurejan*, tempat yang sekarang menjadi Pura Mangkunegaran. Kepatihan lalu berpindah kembali menempati *Dalem Jayanegaran* dan terakhir berpindah ke daerah Jebres. Selengkapnya dalam <https://surakarta.go.id/?p=29211>. Diakses pada 8 Maret 2024 pukul 16.26 WIB.

¹²⁹ Wawancara dengan Bambang Sugiarto, tanggal 27 Desember 2023 di Kompleks Baluwarti Keraton Kasunanan Surakarta.

Kedua, untuk menghindari bangunan Kepatihan digunakan Belanda pada Agresi Militer II.¹³⁰ Bumi hangus ini juga menyasar beberapa bangunan lainnya, seperti Pasar Gede dan Eks Gubernemen Surakarta. Lain seperti Pasar Gede dan Eks Gubernemen yang dibangun kembali, *Dalem Kepatihan* dibiarkan hilang. Sisa *Dalem Kepatihan* hanya menyisakan bangunan masjid.

3.2 Kondisi Sosial dan Politik Saat Konflik

3.2.1 Kebiasaan *Nyandu* Masyarakat Surakarta

Pada hakikatnya masyarakat hidup dalam tatanan sosial yang disertai dengan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan yang biasa dilakukan itulah yang kemudian dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tak terkecuali masyarakat Surakarta. Saat terjadinya revolusi sosial yang disertai konflik menolak pemberlakuan Swapraja, masyarakat Surakarta hidup dalam suasana yang bergejolak. Akibatnya kehidupan sehari-hari masyarakat Surakarta telah terbiasa hidup dibawah tekanan akibat konflik-konflik yang terjadi.¹³¹ Kondisi yang demikian itu menyebabkan masyarakat memiliki kebiasaan hidup baru, yakni *nyandu*. Candu merupakan tanaman *Papaver Somniferum* yang diolah dan kemudian ditambahkan zak aktif.¹³² Keberadaan candu di Indonesia sejatinya gencar dilakukan sejak masa

¹³⁰ Wawancara dengan M. Choiri, tanggal 25 Desember 2023 di Masjid Al-Fatih Kepatihan.

¹³¹ Kekacauan keadaan di Surakarta pada masa revolusi justru memicu masyarakat mengalami stres dan frustrasi. Musradinur, Stres dan Cara Mengatasinya Dalam Prespektif Psikologi. (*Jurnal Edukasi*: Vol 2, No 2, 2016), hlm. 191.

¹³² Selengkapnya dibahas dalam <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/04/30/371/opiummorphine-candu>. Diakses pada 27 April 2024 pukul 22.56 WIB.

kolonial, yakni dijadikan obat atau *supplement* penambah stamina bekerja. Namun oleh masyarakat Surakarta, candu dimanfaatkan untuk bermacam-macam keperluan. Salah satunya yaitu pengganti rokok.¹³³

Masyarakat Surakarta mengenal candu dengan sebutan *seret*. *Seret* yang telah diolah kemudian dikonsumsi beramai-ramai bersama tetangga, saudara dan teman hanya untuk menghilangkan penat dan menambah fantasi kebahagiaan akibat stress karena revolusi sosial yang terjadi. Tak hanya masyarakat biasa yang memanfaatkan candu untuk dikonsumsi, golongan priyayi atau bangsawan juga turut mengonsumsinya.¹³⁴ Sementara itu, Pemerintah Indonesia dalam menyikapi masalah candu tampak bias dengan tidak adanya regulasi pelarangan khusus yang serius. Pemerintah Indonesia justru memanfaatkan candu sebagai sumber pendapatan baru yang menguntungkan.

Harga candu legal milik Pemerintah Indonesia di banderol dengan harga Rp. 60 dan diperbolehkan mengedarkan ulang dengan harga yang berbeda. Mahalnya harga candu tersebut bagi masyarakat yang mengonsumsinya dianggap mencekik dan tak masuk akal. Oleh sebab itu, masyarakat yang terlanjur *nyandu* bahkan nekat mencuri, merampok dan berjudi demi membeli candu. Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga memperbolehkan badan-badan perjuangan untuk mengedarkan candu.

¹³³ Julianto Ibrahim, *Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 94.

¹³⁴ Golongan Bangsawan yang turut mengonsumsi candu justru tidak peduli terhadap terjadinya revolusi sosial yang sedang terjadi. *Ibid.*, hlm. 106.

Candu yang diedarkan itu kemudian ditukar dengan uang, barang ataupun persenjataan untuk mendukung revolusi.¹³⁵

3.2.2 Penurunan Hasil Sektor Usaha Milik Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran

Secara umum, sektor-sektor usaha milik Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran terdiri dari beberapa jenis. Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan menjadi sumber pendapatan utama kedua institusi tradisional ini. Selain ketiga sektor itu, Kadipaten Mangkunegaran juga mengandalkan sektor industri, seperti Pabrik Gula Colomadu dan Pabrik Rokok Priyayi.¹³⁶

Kondisi perekonomian Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran selama masa revolusi mengalami kemerosotan. Kemerosotan itu berangkat dari berbagai perang yang memerlukan banyak pembiayaan. Sedangkan, usaha-usaha yang menjadi sektor andalan keduanya mengalami penurunan. Pada saat suksesi kepemimpinan raja baru, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran justru sedang mengalami penurunan pendapatan yang memprihatinkan. Kekacauan ini timbul akibat konflik yang berkelanjutan. Pengangkatan Paku Buwono XII

¹³⁵ Lihat selengkapnya dalam <https://historia.id/ekonomi/articles/candu-untuk-revolusi-indonesia-PGaW2/page/1>. Diakses pada 27 April 2024 pukul 00.01 WIB.

¹³⁶ Kadipaten Mangkunegaran menjadi salah satu daerah penghasil Gula terbesar di Jawa. Adipati Mangkunegara IV menjadi inisiator pendirian pabrik gula yang didorong oleh tingginya permintaan pasar lokal maupun global. Adanya pabrik gula juga menjadi pendapatan alternatif Kadipaten Mangkunegaran, karena pajak dan persewaan tanah dirasa tidak mencukupi kebutuhan. Wasino, *Kapitalisme Bumi Putera: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 47.

dan Adipati Mangkunegara VIII mendapat perlawanan dari kaum oposisi. Kedua raja muda itu dianggap nihil pengalaman dan tak tertarik pada apapun.¹³⁷ Atas dasar itu, kemudian muncul Gerakan Anti Swapraja yang menimbulkan kekacauan dan keresahan. Kekacauan yang timbul akibat konflik berimbas pula pada bidang ekonomi. Perekonomian Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran dimasa konflik mengalami penurunan dan memicu krisis.

Pada sektor pertanian misalnya, Kadipaten Mangkunegaran mengalami penurunan hasil panen padi. Jumlah hasil panen yang semula belasan ribu ton, ambruk diangka puluhan sampai ratusan kilo saja. Situasi itu juga ditambah dengan kelangkaan pupuk dikalangan petani. Sementara itu, hasil hutan yang melimpah bahkan mampu di ekspor keluar negeri turut tersendat. Kayu potong yang terdiri atas jati, mahoni dan albasia hanya mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri.¹³⁸

Krisis lain yang turut mendapat sorotan adalah Perkebunan. Perkebunan menjadi jantung perputaran roda ekonomi keduanya, baik Kasunanan Surakarta maupun Kadipaten Mangkunegaran. Komoditas utama seperti teh, tebu dan kopi mampu menyumbang pendapatan kas negeri. Setelah bergejolaknya Gerakan Anti Swapraja di Surakarta, kegiatan produksi perkebunan menjadi rumit. Aktivitas pabrik menjadi terhambat

¹³⁷ Benedict Anderson, *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018), hlm. 411.

¹³⁸ Daerah Kadipaten Mangkunegaran yang menjadi basis pertanian dan kehutanan yakni Honggobayan dan Keduwang di Kabupaten Wonogiri serta di Karangpandan Kabupaten Karanganyar dibahas dalam Julianto Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 67.

dan berhenti produksi sementara. Pemberhentian produksi itu dipicu penyerobotan lahan, keresahan pekerja, kurangnya pupuk dan serangan hama.¹³⁹

3.2.3 Kelangkaan Bahan Pokok dan Respon Masyarakat

Terjadinya krisis ekonomi dan bergejolaknya keadaan oleh Gerakan Anti Swaparaja pasca pembentukan DIS, turut berdampak pada penyediaan kebutuhan pokok. Gerakan Anti Swaparaja membuat Paku Buwono XII dan Adipati Mangkunegara VIII kewalahan menghadapi harga kebutuhan pokok yang melonjak. Lonjakan bahan pokok terjadi di pasar-pasar tradisional, berikut tabel harga kebutuhan pokok di wilayah Surakarta masa revolusi (dihitung dalam Rupiah).

Tabel 3. 1 Harga Kebutuhan Pokok di Surakarta Tahun 1946-1948¹⁴⁰

No.	Bahan Pokok/Kg	Penetapan Pemerintah Tahun 1946	Lonjakan Agustus 1947	Lonjakan Juni 1948
1.	Beras	0,15	1,66	17,50
2.	Gula	1,00	1,58	7,30
3.	Garam	0,25	3,48	14,30
4.	Daging	-	4,50-13,60	76-187,60
5.	Kedelai	0,22	2,00	12,00
6.	Minyak Kelapa	0,52	5,09	38,20

¹³⁹ Penyerobotan lahan dilakukan Gerakan Anti Swaparaja terhadap lahan-lahan perkebunan milik Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Lahan hasil penyerobotan itu dibagikan kepada masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan *landreform* gerakan komunis. Wawancara dengan Koes Murtiyah, tanggal 28 Desember 2023 di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta.

¹⁴⁰ Diperoleh dari Arsip Rekso Pustoko Nomor S.35.

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa harga kebutuhan pokok terjadi kenaikan di wilayah Surakarta. Penetapan harga awal kebutuhan pokok di awal tahun 1946 mengalami lonjakan signifikan pada pertengahan tahun berikutnya. Perubahan harga mencapai 500% lebih tinggi dari angka penetapan awal, bahkan menginjak 1000% pada pertengahan tahun 1948.

Tingginya harga kebutuhan pokok di pasar-pasar itu disebabkan berbagai faktor. Terganggunya produksi sektor pertanian dan perkebunan serta penerapan blokade pasukan Belanda, membuat kebutuhan pokok menjadi mahal dan langka.¹⁴¹ Kondisi yang memprihatinkan ini semakin diperparah dengan tingginya permintaan pasar. Angka permintaan pasar ini didorong pertumbuhan penduduk yang turut naik signifikan.¹⁴² Naiknya pertumbuhan penduduk serta mahalnya kebutuhan pokok dimanfaatkan pedagang curang. Para pedagang orang-orang Tionghoa melakukan penimbunan barang-barang di toko-toko miliknya yang berujung pada kemarahan rakyat.¹⁴³

Masyarakat Surakarta yang tergabung dalam organisasi kelaskaran kemudian melakukan aksi penjarahan. Penjarahan menasar toko-toko milik pedagang Tionghoa untuk kemudian dicuri dan sebagian lagi dibakar. Aksi penimbunan yang dibalas dengan penjarahan menambah pelik urusan

¹⁴¹ Produksi pertanian dan Perkebunan terganggu dengan adanya pemberontakan Gerakan Anti Swapraja. Pemberlakuan blokade oleh Belanda juga berakibat pula pada terhentinya suplai obat medis ke wilayah Surakarta. Lihat George Mc. Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*. (Surakarta: UNS Press, 1995), hlm. 319.

¹⁴² Julianto Ibrahim, *loc.cit.*

¹⁴³ Penimbunan barang kebutuhan pokok di wilayah Surakarta jauh dari kata normal. Para pedagang Tionghoa menimbun dari ratusan hingga ribuan kilo bahan kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan ditengah naiknya angka permintaan pasar. *Ibid.*,

keamanan di Surakarta. Adipati Mangkunegara VIII merespon dengan memberikan intruksi agar rakyat bersabar dan bertahan dikeadaan susah demi menghindari pergesekan.

Guna meminimalisir pergesekan semakin parah, Dewan Pertahanan Daerah Surakarta dibawah Soediro mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 1947 berisikan ketentuan dan petunjuk teknis penyetakan barang. Setiap orang hanya berhak menyimpan keperluan sehari-hari sebanyak 15 kg. Sementara itu, pengusaha-pengusaha menengah ke bawah diperbolehkan menimbun bahan makanan sebanyak-banyaknya 500 kg dan wajib habis selama 5 hari.¹⁴⁴ Bagi pengusaha menengah ke atas dibatasi 1000 kg saja.

Ditengah kekisruhan harga kebutuhan pokok di Surakarta kemudian muncul peredaran uang palsu dan uang cetakan Belanda.¹⁴⁵ Bermacamnya jenis uang kemudian memunculkan kebingungan di masyarakat. Transaksi jual beli menjadi kacau dan tak ada standarisasi sistem pembayaran. Untuk mengantisipasi kekacauan transaksi berlanjut, Dewan Pertahanan Daerah Surakarta memperbolehkan mata uang asing dipakai bertransaksi. Namun besaran nominalnya 10 : 1.

¹⁴⁴ Bahan makanan yang tidak habis terjual selama 5 hari akan disita oleh Dewan Pertahanan Daerah Surakarta. Lihat Peratoeran Dewan Pertahanan Soerakarta Tahun 1947, *Arsip Rekso Pustoko*, No. S. 746.

¹⁴⁵ Uang cetakan Belanda dikenal masyarakat sebagai uang *NICA (Netherlands Indies Civil Administration)* dan uang merah. Selengkapnya dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Duel-Uang-Merah-Vs-Uang-Putih.aspx>. Diakses pada 13 Maret 2024 pukul 22.25 WIB

Naiknya harga kebutuhan pokok ditambah kekacauan sistem pembayaran di Surakarta ternyata berpengaruh pada penggajian pekerja. Penghasilan yang didapatkan para pekerja setiap bulan tak mampu mencukupi kebutuhan, hal itu seimbang dengan naiknya harga-harga yang semakin meroket.

Tabel 3. 2 Besaran Penghasilan Anjuran Pemerintah Indonesia ¹⁴⁶

No.	Kategori Pekerja	Besaran Upah
1.	Buruh	Rp. 15-25 / hari
2.	Pegawai Rendah	Rp. 70-160 / bulan
3.	Pegawai Menengah	Rp. 92-380 / bulan
4.	Pegawai Tinggi	Rp. 175-700 / bulan

Perolehan gaji yang diterima baik oleh buruh maupun para pegawai menjadi tak berarti. Besaran nominal yang diterima tak mampu mengimbangi besarnya kebutuhan. Kondisi yang semakin sulit ini kemudian memaksa masyarakat berani mencari jalan lain. Salah satunya dengan mencari pinjaman hutang. Mencari pinjaman hutang secara terpaksa dilakukan masyarakat untuk menyukupi kebutuhan sehari-hari.

¹⁴⁶ Untuk sistem penggajian pegawai, Pemerintah Indonesia menyesuainya dengan pangkat dan jabatan. George Mc. Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm. 86-87.

Tabel 3. 3 Jumlah Peminjaman Uang di Bank Wilayah Surakarta Tahun 1950 ¹⁴⁷

Kategori Bank	Jumlah			Rata-Rata Pinjaman/Orang
	Bank	Peminjam	Besaran Pinjaman	
Bank Pusat	1	-	-	-
Bank Pasar	18	28.489	Rp. 1.156.325	Rp. 40,59
Bank Desa	42	33.442	Rp. 710.406	Rp. 21,24
Jumlah	61	61.931	Rp. 1.866.734	Rp. 30,91

Pinjaman hutang yang dilakukan para pegawai hampir menyeluruh disemua tingkatan, dari pegawai rendah sampai tinggi. Hutang yang diambil juga atas dasar persetujuan pihak yang memberi pinjaman, yakni dicicil tiap bulan dengan memotong gaji. Oleh karena itu bahkan sebagian para pegawai tidak lagi menerima gaji karena telah habis untuk mengangsur besarnya hutang. Pinjaman hutang yang diambil masyarakat Surakarta saat itu bervariasi, terdiri atas pinjaman bank, perseorangan maupun lintah darat.¹⁴⁸ Keadaan serba sulit ini bertahan lama setidaknya sampai pada penghujung 1950. Beberapa pengusaha bahkan mengalami *Bussines Crisis* yang berujung pada penutupan usaha. Langkah itu kemudian diikuti

¹⁴⁷ Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Surakarta: Panitia Dua Tahun DPRD Sementara Surakarta, 1953), hlm. 86-87.

¹⁴⁸ Lintah darat adalah sebutan bagi orang yang mencari nafkah dari membungakan uang. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1198.

pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.¹⁴⁹ Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran menambah jumlah pengangguran dan menghilangkan kesempatan kerja usia produktif. Kondisi yang sulit itu kemudian memicu masalah-masalah sosial yang berujung pada Tindakan kriminalitas. Tindakan kriminalitas yang muncul pada akhirnya sulit diatasi oleh aparat kepolisian, mengingat minimnya jumlah polisi di Surakarta saat itu.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Pada permulaan tahun 1945, jumlah kongsi dagang atau perseroan di Surakarta berjumlah 40 buah. Akibat keadaan ekonomi yang semakin memburuk, jumlah tersebut menurun drastis menjadi 29 buah pada tahun 1949. Penutupan kongsi dagang dalam jumlah besar juga berdampak pada naiknya tingkat pengangguran ditengah melonjakannya jumlah penduduk di Surakarta. Lihat Julianto Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 90.

¹⁵⁰ Jumlah anggota Kepolisian di Karesidenan Surakarta tak sebanding dengan jumlah penduduk yang besar. Pada tahun 1948 jumlah polisi di Karesidenan Surakarta hanya berjumlah 191 personil, sedangkan jumlah penduduknya terdapat 3.478.677 jiwa. *Ibid.*, hlm. 112.